

Analisis Determinan Kemiskinan di Sumatera

oleh:

*) Novi Mubyarto, S.E., M.E.

**) Dosen IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Menggunakan data panel dari 10 provinsi untuk periode 1993-2012, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu kemiskinan di Sumatera. Adapun model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi data panel dengan metode first difference. Hasil empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera selama periode 1993-2012 tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, tetapi peningkatan ketimpangan pendapatan meningkatkan kemiskinan di wilayah tersebut. Peningkatan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap menurunkan kemiskinan. Di sisi lain, variabel positif dan signifikan terkait dengan kemiskinan di Sumatera adalah tingkat inflasi dan dummy krisis. Selain itu pengangguran tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan di Sumatera.

Kata Kunci : *Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan.*

PENDAHULUAN

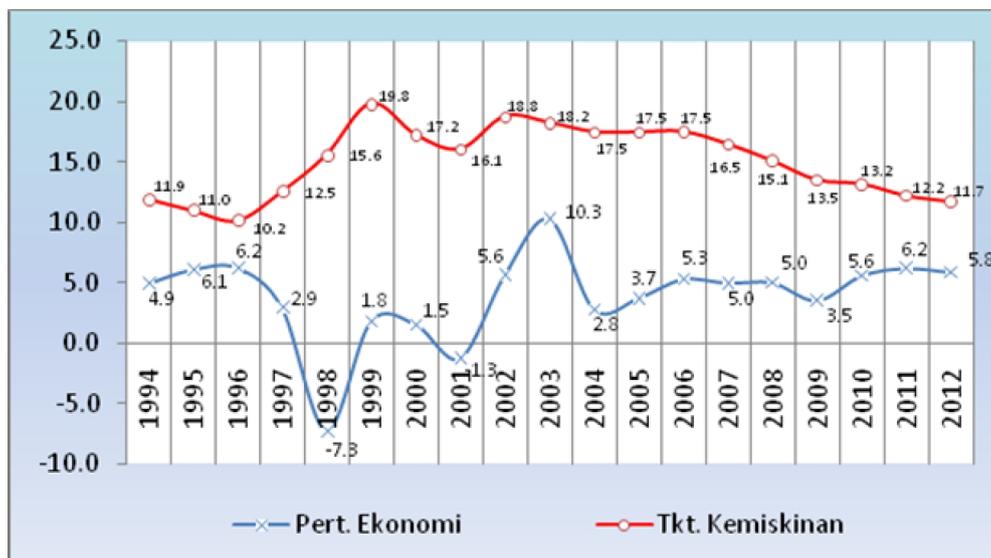
Sebagai pulau terbesar kedua yang didiami oleh 52,3 juta jiwa penduduk dengan potensi sumberdaya alam melimpah serta didukung posisi geografis yang strategis, tentu saja Sumatera merupakan bagian penting dalam peta perekonomian nasional. Data statistik menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera telah menyumbang sedikitnya 23,81 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Cukup lumrah mengingat Sumatera merupakan produsen karet dan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan produksi karet sebesar 65 persen dari total produksi nasional dan kelapa sawit sebesar 78,43 persen dari total produksi nasional. Di samping itu Sumatera juga memiliki 40 persen dari cadangan *Coal Bead Methane* nasional, serta 50 persen dari total cadangan batubara nasional. Tak mengherankan jika 5 dari 20 kabupaten terkaya serta 3 dari 10 provinsi dengan PDRB terbesar di Indonesia berada di Sumatera (Bappenas (2010).

Namun begitu, tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumatera dalam realitanya belum cukup linear dengan besarnya kekayaan alam dan ukuran aktivitas ekonomi yang dimiliki. Data statistik memperlihatkan bahwa angka kemiskinan di Sumatera hingga tahun 2012 masih relatif tinggi yakni sebesar 11,72 persen, atau sebanyak 6,18 juta jiwa. Angka ini lebih tinggi dari tingkat kemiskinan secara nasional yaitu sebesar 11,66%. Hal ini tentu saja menimbulkan sebuah

paradoks terkait dengan hubungan antara kekayaan alam, ukuran perekonomian dan tingkat kemiskinan.

Bila dilihat selama periode 20 tahun terakhir, secara umum terlihat adanya konvergensi antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera, dimana peningkatan pertumbuhan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang.

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kurun Waktu 1994-2012.



Sumber: BPS, diolah

Konvergensi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Sumatera berhasil memperoleh manfaat pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan studi-studi empiris sebelumnya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan cara yang efektif untuk menaggulangi kemiskinan (Ravallion and Chen (1997); Dollar and Kraay (2002), dan Warr (2000).

Namun jika diamati lebih mendalam terlihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun setelah krisis ekonomi 1997/1998 ada pergerakan yang searah (*co-movement*) antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Artinya kecenderungan meningkatnya pertumbuhan ekenomi diikuti juga oleh meningkatnya kemiskinan, demikian pula sebaliknya. Kecenderungan tersebut setidaknya berlangsung sejak tahun 1999 hingga tahun 2009. Trend searah ini mengindikasikan bahwa dalam periode tersebut masyarakat miskin di Sumatera

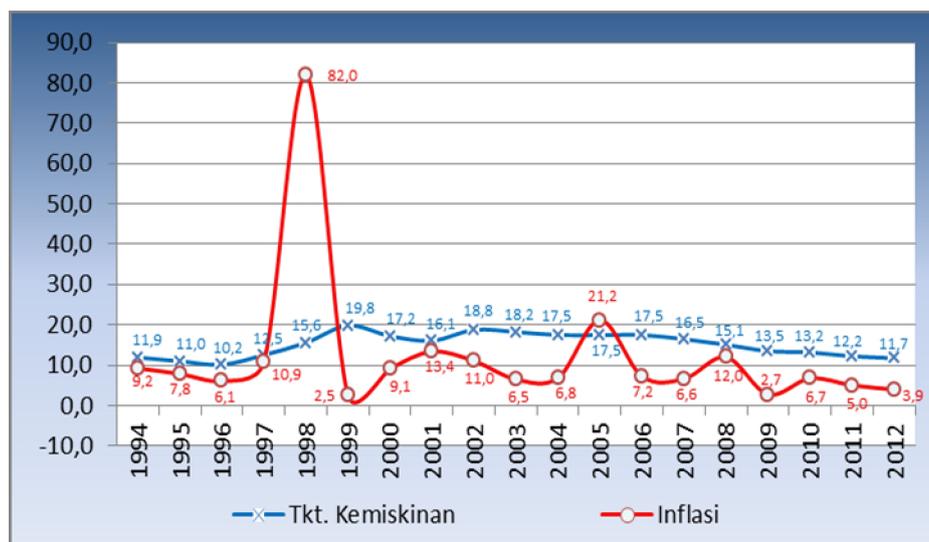
relatif tidak memperoleh manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun konvergensi yang benar-benar terjadi hanya pada periode sebelum krisis (1994-1996) dan pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2010-2012).

Berdasarkan kajian literatur ada beberapa hal yang memungkinkan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan sebagaimana yang terjadi di Sumatera, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun pasca krisis. *Pertama*, adanya efek lanjutan dari krisis 1998 yang mereduksi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Janvry and Sadoulet (2000) bahwa satu tahun resesi dapat membatalkan pengurangan kemiskinan lebih dari satu tahun pertumbuhan. Demikian pula Agenor (2004) menyatakan bahwa kontraksi output yang tajam akibat resesi cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan secara signifikan, sedangkan ekspansi cenderung memiliki efek yang terbatas. Fenomena ini juga sejalan dengan pendapat Lustig (2000) yang menyatakan bahwa krisis ekonomi tidak hanya mempengaruhi standar hidup orang miskin saat ini, tetapi juga kemampuan mereka untuk tumbuh keluar dari kemiskinan. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi di Sumatera kemungkinan masih terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, sektor-sektor tertentu, serta hanya dikuasi oleh segelintir kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Sumatera karena adanya ketimpangan. Data statistik menunjukkan terjadi peningkatan indeks gini di wilayah Sumatera pasca krisis dari 0,22 pada tahun 2003 meningkat hingga 0,29 pada tahun 2012. Sejalan dengan hal ini Ravallion (2001) menegaskan bahwa ketimpangan yang tinggi atau meningkat akan menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan. Sementara itu Smeru (2005) menyatakan bahwa ketimpangan juga dapat menjadi tanda yang mengingatkan kita akan kekeliruan dalam perumusan kebijakan. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi di Sumatera kemungkinan belum ditopang oleh sektor-sektor dengan elastisitas kesempatan kerja yang tinggi. Beberapa studi empirik di beberapa negara telah membuktikan kecenderungan tersebut bahwa kemiskinan amat berhubungan dengan tingkat pengangguran, antara lain Cutler and Katz (1991) dan Powers (1995).

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia.

Jika dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) wilayah Sumatera sebagai *proxy* dari pencapaian kualitas sumber daya manusia, masih dalam kategori sedang yaitu 74,67. Hughes and Irfan (2007) menyatakan bahwa investasi dalam modal manusia adalah penting, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga lebih langsung untuk pengurangan kemiskinan. Secara khusus, literatur menunjukkan bahwa pendidikan meningkatkan stok modal manusia, yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan, produktivitas tenaga kerja dan upah. Karena tenaga kerja adalah aset yang paling penting dari masyarakat miskin, maka meningkatkan pendidikan masyarakat miskin akan cenderung untuk mengurangi kemiskinan. Disamping faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, secara teoritis tingkat kemiskinan juga biasanya sering dihubungkan dengan tingkat inflasi. Hal ini mengingat indikator kemiskinan yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi masyarakat, dimana tingkat inflasi dianggap sangat menentukan kemampuan masyarakat miskin untuk membiayai pengeluarannya. Azis (2002) dan Dhanani and Islam (2002) dalam hasil studi mereka menemukan bahwa selama krisis dampak inflasi terhadap kemiskinan jauh lebih signifikan dari pada dampak pertumbuhan ekonomi. Adapun perkembangan inflasi yang dihubungkan dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera dapat diperlihatkan oleh gambar 2 di bawah ini

Gambar 2. Perkembangan Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat kemiskinan di Sumatera Kurun Waktu 1994-2012



Sumber : BPS Indonesia Data Diolah

Terlihat bahwa tren perkembangan inflasi di Sumatera cenderung berlangsung searah (positif) dengan perkembangan tingkat kemiskinan. Meski tidak cukup persisten, terutama

pada kurun waktu setelah puncak krisis bersamaan dengan tingginya volatilitas inflasi pasca krisis, namun secara umum tren yang searah ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera juga amat terkait dengan perkembangan inflasi yang berlangsung.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelas bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera yang relatif tinggi bukan tanpa sebab. Kendati kaya akan sumberdaya alam serta memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, namun Sumatera memiliki beberapa problem spesifik yang perlu dieksplor lebih jauh terkait dengan masih relatif tingginya tingkat kemiskinan yang dialami. Variasi ukuran ekonomi antar daerah, krisis ekonomi, ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, tingkat pengangguran, kualitas SDM, serta tingkat inflasi merupakan beberapa faktor yang dianggap turut berpengaruh. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian guna mengetahui secara tepat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, perubahan ketimpangan pendapatan, perubahan indeks pembangunan manusia, perubahan jumlah pengangguran, tingkat inflasi dan pengaruh krisis ekonomi terhadap perubahan jumlah kemiskinan di Sumatera.

LANDASAN TEORI

Telaah terhadap penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mempelajari konsep dan teori serta berbagai metodologi dan temuan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, jumlah pengangguran, tingkat inflasi dan dampak dari krisis ekonomi terhadap kemiskinan. Berdasarkan itu semua, dipilih metodologi penelitian dan bahan analisis untuk keperluan penelitian ini.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan.

Kaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan merupakan salah satu fakta penting dalam pembangunan ekonomi. Sebagaimana telah terungkap dalam banyak kajian, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu cara paling efektif untuk menaggulangi kemiskinan (Ravallion and Chen

(1997); Deininger and Squire (1998); Dollar and Kraay (2002); Warr (2000); Balisacan et al. (2003); Ravallion (2005; Ravallion (2005); Lopez (2004); Roemer and Gugerty (1997); Gallup et al. (1998); Rodrik (2006). Sebagai contoh, Dollar and Kraay (2002) dalam studinya menyatakan bahwa pertumbuhan baik bagi masyarakat miskin (*growth is good for the poor*), sementara perubahan ketimpangan tidak memiliki pengaruh yang sistematis. Begitupula Lopez (2004) menemukan bahwa pertumbuhan yang paling penting untuk pengurangan kemiskinan di antara negara-negara berpenghasilan rendah, sementara ketimpangan semakin membatasi pertumbuhan untuk negara-negara berpenghasilan tinggi. Kesimpulan umum dari penelitian ini dan penelitian serupa lainnya adalah bahwa pertumbuhan baik bagi masyarakat miskin.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat disertai dengan meningkatnya ketimpangan. Sebagaimana di ungkapkan dalam hipotesis Kuznets (1955) menyebutkan bahwa proses pembangunan akan disertai dengan meningkatnya ketimpangan secara substansial, yang akan berbalik hanya pada tahap perekonomian sudah maju (*advanced*). Hal tersebut juga disampaikan oleh Ahluwalia et al. (1979) dimana ada dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan meningkatnya ketimpangan sehingga masyarakat miskin mendapat bagian yang kecil dari pertumbuhan ekonomi.

Ada banyak bukti empiris yang berpendapat bahwa ketimpangan buruk bagi masyarakat miskin (Ravallion (1997); Hanmer and Naschold (2000); Ravallion (2001); Dagdeviren et al. (2002); Mosley et al. (2004); dan Kraay (2006). Sebagai contoh, Ravallion (1997) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap akan memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan, tidak terkecuali di negara-negara yang tingkat ketimpangannya tinggi. Namun, dalam studinya Ravallion juga menunjukkan bahwa terdapat elastisitas pertumbuhan yang lebih tinggi dari pengurangan kemiskinan di negara-negara dengan indeks Gini yang lebih rendah (yaitu, distribusi pendapatan yang lebih merata). Dengan alasan inilah mengapa ketimpangan juga penting untuk mereduksi kemiskinan. Kanbur (2004) menegaskan bahwa pertumbuhan merupakan nilai tambah bagi pengurangan kemiskinan, sementara ketimpangan adalah minusnya.

Hubungan Antara Modal Manusia dan Kemiskinan

Awan et al. (2011) menyelidiki hubungan berbagai tingkat pendidikan dan pengalaman pada kemiskinan perkotaan di kota berukuran menengah di

Pakistan seperti Sargodha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman berhubungan negatif dengan status kemiskinan individu. Ini berarti pendidikan pada orang miskin diperlukan dalam memecahkan lingkaran setan kemiskinan. Becker (1995) membahas beberapa bukti yang berhubungan investasi di bidang pendidikan dan modal manusia lainnya, menyimpulkan bahwa investasi dalam modal manusia adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan tingkat penghasilan orang miskin yang layak dan kesehatan yang lebih baik.

Selanjutnya Aoun (2004) juga menyatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di negara-negara berkembang adalah pentingnya investasi pada modal manusia, hal ini berasal dari kenyataan bahwa pengetahuan dapat dilihat sebagai sumber yang paling kuat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan modal manusia, melalui perbaikan layanan sosial dasar termasuk kesehatan dan pendidikan, dapat dianggap sebagai isu penting yang mempengaruhi prospek untuk pengurangan kemiskinan yang signifikan.

Hubungan Antara Pengangguran dan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di suatu negara tentunya tidak terlepas dari kinerja variabel-variabel ekonomi makro negara yang bersangkutan. Hal ini antara lain diteliti oleh Cutler and Katz (1991) dan Powers (1995) menemukan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar tingkat kemiskinan. Selanjutnya studi yang dilakukan Balke and Slottje (1993) yang menguji hubungan antara variabel-variabel ekonomi makro dan tingkat kemiskinan di US menyimpulkan bahwa pengangguran berdampak buruk pada kemiskinan.

Hubungan Antara Inflasi dan Kemiskinan

Hasil studi dari Easterly and Fischer (2001) menyajikan bukti-bukti yang mendukung pandangan bahwa inflasi membuat orang miskin lebih buruk. Mereka juga menemukan bahwa inflasi yang tinggi cenderung menurunkan pangsa pendapatan dari kuintil termiskin dan penurunan upah minimum riil, yang cenderung meningkatkan kemiskinan. Chani et al (2011) yang menyelidiki peran pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menjelaskan prevalensi kemiskinan di Pakistan. Hasil studi empiris menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi telah secara signifikan mengurangi kemiskinan, sedangkan inflasi dan keterbukaan perdagangan telah menyebabkan peningkatan kemiskinan di Pakistan. Begitupula Romer and Romer (1998) melakukan studi tentang “*Monetary Policy and the Well-Being of the Poor*”. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang bertujuan untuk inflasi yang rendah dan permintaan agregat yang stabil adalah yang paling mungkin untuk menghasilkan benar-benar kondisi membaik bagi masyarakat miskin dalam jangka panjang. Mereka juga meyakini bahwa paket khas reformasi yang membawa inflasi yang rendah dan stabilitas makroekonomi juga akan menghasilkan perbaikan kondisi bagi masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk semua.

METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan adalah dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan berbagai data yang mendukung penelitian. Obyek penelitian meliputi seluruh penduduk miskin di 10 provinsi yang ada di Sumatera tahun 1993-2012.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Adams (2004) dengan menggunakan data panel dan dalam bentuk logaritma menggunakan metode *First Difference*, dimana setiap model yang digunakan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah diajukan.

Dengan menggunakan spesifikasi model log-log, parameter secara langsung melambangkan elastisitas dari kemiskinan terhadap variabel-variabel determinan. Selanjutnya, spesifikasi model penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

$$\Delta \log POV_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \log YPC_{it} + \gamma_2 \Delta \log GR_{it} + \gamma_3 \Delta \log IHK_{it} + \gamma_4 \Delta \log IPM_{it} + \gamma_5 \Delta \log UNE_{it} + \gamma_6 DMKRISIS + \Delta \epsilon_{it}$$

Dimana : $(\Delta X_{it} \equiv X_{it} - X_{it-1})$.

$\Delta \log YPC$: nilai selisih log pendapatan per kapita di daerah i periode t.

$\Delta \log POV$: nilai selisih log jumlah kemiskinan di daerah i periode t.

$\Delta \log GR$: nilai selisih log ketimpangan pendapatan di daerah i periode t.

$\Delta \log IPM$: nilai selisih log indeks pembangunan manusia di daerah i periode t.

$\Delta \log IHK$: nilai selisih log tingkat inflasi di daerah i pada periode t .
$\Delta \log UNE$: nilai selisih log jumlah pengangguran di daerah i pada periode t .
$DMKRISIS$: dummy tahun, untuk membedakan kondisi sebelum dan setelah krisis ekonomi di Indonesia
$\Delta \epsilon_{it}$: <i>error term</i> .

Deskripsi Operasional Variabel

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, berikut disampaikan deskripsi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan nama dan keterangan untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada lampiran.

1. Angka Kemiskinan (*Head Count Index*) Konsep dan definisi penduduk miskin mengacu kepada konsep dan definisi yang digunakan BPS. Oleh BPS, jumlah dan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran per kapitanya. Besarnya nilai rupiah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita dan kebutuhan dasar non makanan (papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tanggadan individu yang mendasar lainnya) disebut garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita riil dalam *rupiah* (berdasarkan harga konstan 2000) menurut provinsi dengan migas.
3. Ketimpangan Pendapatan. Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang digunakan adalah indeks Gini menurut provinsi yang dipublikasikan oleh BPS, dimana dalam penghitungannya (karena ketiadaan data pendapatan) BPS menggunakan data pengeluaran dan bukan data pendapatan.
4. Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian ini digunakan IPM yang dipublikasikan oleh BPS sebagai proxy terhadap modal manusia.
5. Inflasi. yaitu berdasarkan pada nilai indeks harga konsumen (IHK) dengan tahun dasar 2007 yang disesuaikan, data diperoleh dari BPS.
6. Pengangguran, yaitu jumlah pengangguran terbuka per provinsi.

Dummy krisis yaitu dummy tahun, untuk kondisi sebelum krisis (1993-1996) dan setelah krisis (1997-2012).

Metode Estimasi Data Panel

Guna menyesuaikan dengan tujuan, maka dalam penelitian *ini penulis* melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis data panel. Analisis data panel merupakan analisa yang mengkombinasikan data *crosssection* dengan data *time series*. Kelebihan analisis data panel adalah data panel dapat memberikan lebih banyak informasi dan variasinya karena banyaknya jumlah data, mengurangi kolinearitas antarvariabel babas dan meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga estimasi parameter menjadi lebih efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paket program Eviews 6. Berdasarkan uji asumsi klsik menggunakan uji *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) tidak ditemukan masalah multikolinieritas, sementara berdasarkan uji *Durbin Watson* (DW) juga tidak ditemukan masalah autokorelasi, namun berdasarkan uji Park model persamaan kemiskinan mengandung masalah heteroskedastisitas. Untuk itu pada penelitian ini hasil estimasi menggunakan metode General Least Square (*Period weights*).

Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Kemiskinan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.021152	0.009294	-2.275820	0.0241
ΔLogYPC	0.144653	0.114552	1.262774	0.2085
ΔLogGR	0.128964	0.059130	2.181017	0.0306
ΔLogIPM	-3.567131	0.457594	-7.795400	0.0000
ΔLogIHK	0.134862	0.056006	2.407986	0.0171
ΔLogUNE	0.017635	0.015496	1.137995	0.2568
DMKRISIS	0.131688	0.016522	7.970618	0.0000
R-squared	0.540549	Mean dependent var		-0.028943
Adjusted R-squared	0.523842	S.D. dependent var		0.174657
S.E. of regression	0.114122	Sum squared resid		2.148918
F-statistic	32.35403	Durbin-Watson stat		1.729566
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil regresi pada Tabel 1 untuk persamaan kemiskinan, menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.5405. Artinya, 54,05 persen variasi perubahan kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel independen, sementara sisanya 45,95 persen diterangkan oleh variabel lain di luar model, yang terangkum dalam kesalahan random.

Sementara itu, Uji-F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hasil uji-F pada model persamaan kemiskinan menunjukkan P-value untuk F-test sebesar 0,0000 lebih kecil dari *critical value* 5% bahkan 1%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu jumlah kemiskinan. Selanjutnya untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan Uji-t dan sekaligus untuk menguji hipotesis yang digunakan.

a. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan terhadap perubahan kemiskinan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan jumlah kemiskinan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan terhadap kemiskinan mungkin saja disebabkan oleh dampak dari krisis, sebagaimana diungkapkan oleh Janvry dan Sadaolet (2002) yang menyatakan bahwa ada asimetri dalam pengaruh perubahan pendapatan terhadap kemiskinan, dimana satu tahun resesi dapat membatalkan efek pengurangan kemiskinan lebih dari satu tahun pertumbuhan. Jika asimetri berlaku, hubungan keseluruhan antara pendapatan dan kemiskinan menyesatkan karena ini terutama diperoleh melalui resesi bukan melalui pertumbuhan, yang mengarah ke prediksi yang salah tentang potensi pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan.

b. Pengaruh Perubahan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Perubahan Kemiskinan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengaruh variabel perubahan ketimpangan pendapatan terhadap perubahan jumlah kemiskinan positif dan signifikan, dengan nilai koefisien elastisitas sebesar 0,13 yang berarti bahwa setiap peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 1 persen akan di respon oleh peningkatan jumlah kemiskinan sebesar 0,13 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan buruk bagi pengentasan kemiskinan.

Temuan ini juga sesuai dengan hasil studi empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Kakwani et al (2004) Adams (2004) Ravallion (2001) Bourguignon (2004) dan Kanbur (2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara

merata oleh anggota-anggota masyarakat dengan ketimpangan yang tinggi, dan hal ini akan berdampak pada berkurangnya keefektifan pertumbuhan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan.

c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (modal manusia) terhadap Perubahan Jumlah Kemiskinan.

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa perubahan indeks pembangunan manusia sebagai *proxy* dari modal manusia berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan dengan nilai koefisien elastisitas sebesar -3,57 yang berarti bahwa setiap peningkatan indeks modal manusia sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 3,57 persen.

Hal ini tentu sangat masuk akal karena melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kondisi kesehatan yang lebih baik biasanya akan meningkatkan kapasitas manusia untuk berbagi dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika orang-orang yang mampu mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kondisi kesehatan yang lebih baik, cenderung memiliki produktifitas yang lebih tinggi dan tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi dari Gundlach et al. (2004), yang menemukan bahwa investasi yang lebih tinggi dari modal manusia meningkatkan pendapatan kelompok miskin, tidak hanya melalui efeknya pada pendapatan rata-rata, tetapi juga melalui efeknya pada distribusi pendapatan. Hasil temuan mereka tampak kuat untuk sejumlah spesifikasi alternatif dan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif akan menjadi strategi pengurangan kemiskinan yang utama dan terbaik. Begitupula Said and Widyanti (2002), menyatakan bahwa meningkatkan tingkat pendidikan diyakini menjadi kunci utama untuk pengurangan kemiskinan, karena pendidikan sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial ekonomi lainnya seperti tingkat pendapatan, partisipasi dan pemberdayaan.

d. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Perubahan Jumlah Kemiskinan.

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan dengan nilai koefisien elastisitas

sebesar 0,13. Ini berarti bahwa setiap peningkatan tingkat inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah kemiskinan sebesar 0,13 persen.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat inflasi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kemiskinan. Adanya inflasi tentunya akan menambah beban hidup, ketika semua harga mengalami kenaikan, daya beli masyarakat akan turun, hal ini pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menambah angka kemiskinan.

Hasil studi ini juga sesuai dengan hasil-hasil studi empiris sebelumnya yang dilakukan oleh: Powers (1995), Easterly and Fischer (2001), Romer and Romer (1998), dan Sabir and Tahir (2012) yang menyajikan bukti-bukti yang mendukung pandangan bahwa inflasi membuat orang miskin menjadi lebih buruk. Mereka menemukan bahwa inflasi yang tinggi cenderung menurunkan pangsa pendapatan dari kuintil termiskin dan penurunan upah minimum riil karena kekakuan upah jangka pendek, yang cenderung meningkatkan kemiskinan.

Sementara itu, Laporan Pembangunan Dunia (*World Development Report 2000/2001*), menyatakan bahwa kerentanan dan ketidakpastian merupakan dimensi-dimensi penting dari kemiskinan di Indonesia. Setiap penurunan pendapatan rumah tangga yang berada di dekat garis kemiskinan baik akibat resesi maupun peningkatan inflasi akan memiliki dampak besar terhadap kemiskinan. Lebih dari itu, diagnosis ini menunjukkan adanya tingkat pergerakan (*churning*) yang tinggi dan kemiskinan yang bersifat sementara. Karena, populasi dalam jumlah yang besar, yang berada di sekitar garis kemiskinan termasuk kelompok penduduk hampir-miskin, berpindah keluar masuk melewati garis kemiskinan dari tahun ke tahun, bergantung pada guncangan (*shock*) yang dialami.

e. Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Perubahan Jumlah Kemiskinan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan jumlah pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pengangguran tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan jumlah kemiskinan.

f. Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Perubahan Jumlah Kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai studi empiris, menunjukkan bahwa krisis ekonomi akan memperlambat proses pengurangan kemiskinan, karena krisis juga berdampak buruk diantaranya pada penurunan tingkat pertumbuhan, peningkatan ketimpangan pendapatan, penurunan investasi, peningkatan inflasi, dan peningkatan pengangguran.

Hasil estimasi memperlihatkan pengaruh yang signifikan dari variabel dummy krisis ekonomi terhadap perubahan jumlah kemiskinan, artinya krisis menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan lebih besar dibandingkan dengan sebelum krisis. Temuan ini konsisten dengan berbagai studi empiris yang menunjukkan bahwa krisis memiliki dampak negatif pada peningkatan kemiskinan. (Janvry and Sadaulet (2000), Dhanani and Islam (2002), Azis (2002), Azis (2008), Agenor (2004), Lustig (2000), dan Inder (2004).

Janvry and Sadaulet (2000) menyatakan bahwa satu tahun resesi dapat membatalkan efek pengurangan kemiskinan lebih dari satu tahun pertumbuhan atau dengan kata lain dampak penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan akan lebih besar daripada kenaikannya. Demikian pula dengan, Lustig (2000) menyatakan bahwa krisis ekonomi makro tidak hanya mempengaruhi standar hidup orang miskin saat ini, tetapi juga kemampuan mereka untuk tumbuh keluar dari kemiskinan.

KESIMPULAN

Pertumbuhan pendapatan dan jumlah pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan di Sumatera. Sedangkan perubahan ketimpangan pendapatan, tingkat inflasi dan dummy krisis berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kemiskinan di Sumatera. Sementara itu, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Sumatera.

Implikasi Kebijakan

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan terhadap perubahan kemiskinan menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan tidak dirasakan oleh penduduk miskin. Jika asimetri memang berlaku sebagai dampak dari krisis maka hal ini menyiratkan bahwa menghindari biaya resesi pada masyarakat miskin harus menjadi prioritas kebijakan perhatian karena dibutuhkan bertahun-

tahun pertumbuhan untuk menebus kerugian yang terjadi selama satu tahun resesi.

2. Pengaruh ketimpangan yang signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan mengindikasikan perlunya mendorong pertumbuhan di satu sisi, dan mengoreksi ketimpangan di sisi yang lain. Pemerintah, di satu sisi perlu secara konsisten mengimplentasikan konsep “*Growth with equity*“ yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (*inclusive growth*) dengan cara mendorong tumbuh-kembangnya industri padat karya, membangun sektor pertanian dan sektor informal, mengembangkan usaha kecil dan mikro, membangun infrastruktur ekonomi yang lebih merata, dan seretusnya. Di sisi lain, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang secara progresif memperbaiki distribusi pendapatan, misalnya melalui penerapan pajak progresif, redistribusi asset, subsidi, perluasan jangkauan pelayanan keuangan bagi penduduk miskin dan dorongan akses ke kredit komersial untuk usaha mikro dan kecil.
3. Inflasi yang tinggi berdampak buruk terhadap peningkatan kemiskinan. Untuk itu menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama pengendalian inflasi perlu terus diupayakan. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui pengendalian jumlah uang beredar, menjaga stok dan distribusi pangan khususnya untuk barang-barang kebutuhan pokok, meningkatkan kapasitas produksi domestik, dan perkuat program perlindungan sosial yang komprehensif, merupakan beberapa agenda kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
4. Akumulasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesehatan, merupakan komponen kunci yang terbaik dan paling utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Implikasinya, kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan. Merujuk pada pendapat Tilak (2007) yang menyatakan bahwa literasi (melek huruf semata) dan pendidikan dasar tidak cukup berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hanya ketika orang setidaknya menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas, hubungan antara pendidikan dan kemiskinan menjadi negatif dan signifikan. Untuk itu minimal setiap masyarakat harus dapat mengenyam tingkat pendidikan menengah atas karena hal ini sangat penting dalam mewujudkan hubungan yang kuat antara modal manusia dan penurunan kemiskinan. Selanjutnya, dikarenakan masalah

pendidikan dan kesehatan tidak berdiri sendiri, untuk itu penyelesaian masalah pendidikan dan kesehatan juga memerlukan penanganan yang terintegrasi dan terfokus. Diperlukan pula program-program lain yang mendukung, utamanya program-program penanggulangan kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agenor, P. R. (2004). "Macroeconomic Adjustment and The Poor: Analytical Issues and Cross-Country Evidence " *Journal of Economic Surveys* Vol. 18. No. 3: Hal. 351-408
- Ahluwalia, M. S., Carter, N. G. and Chenery, H. B. (1979). "Growth and Poverty in Developing Countries." *Journal of Development Economics*. Vol. 6. Hal. 299-341.
- Aoun, A. (2004). "Poverty Alleviation in the Developing Economies: the Leading Issues." *New Medit*. No. 1.
- Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H. and Waqas, M. (2011). "Impact of education on poverty reduction." *MPRA Paper*. No. 31826.
- Azis, I. (2008). "Macroeconomic Policy and Poverty." *ADB Discussion Paper*. No. 111. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Azis, I. J. (2002). "A New Approach to Modeling the Impacts of Financial Crises on Income Distribution and Poverty." ADB Institute Research Paper. No. 35.
- Balisacan, A. M., Pernia, E. M. and Asra, A. (2003). "Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia: what do subnational data show?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 39. No. 3: Hal. 329–351.
- Balke, N. S. and Slottje, D. J. (1993). "Poverty and Change in the Macroeconomy: A Dynamic Macroeconometric Model." *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 75. No. 1: Hal. 117-122.
- Bappenas (2010). *Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Memperkuat Sinergi Antara Pusat-Daerah dan Antar Daerah*. Jakarta, Bappenas.
- Becker, G. S. (1995). "Human Capital and Poverty Alleviation." HRO Working Paper. Human Resources Development and Operations Polic. No. 52.
- Cutler, D. M. and Katz, L. (1991). "Macroeconomic Performance and the Disadvantaged." *Brookings Papers on Economic Activity*. Vol. 2.

- Dagdeviren, H., Hoeven, R. V. D. and Weeks, J. (2002). "Redistribution Does Matter: Growth and Redistribution for Poverty Reduction." Discussion Paper. No. 5.
- Deininger, K. and Squire, L. (1998). "New ways of looking at old issues: inequality and growth." *Journal of Development Economics*. Vol. 57. Hal. 259-287.
- Dhanani, S. and Islam, I. (2002). "Poverty, Vulnerability and Social Protection in a Period of Crisis: The Case of Indonesia." *World Development*. Vol. 30. No. 7: Hal. 1211–1231.
- Dollar, D. and Kraay, A. (2002). "Growth is good for the poor." *Journal of Economic Growth* Vol. 7. Hal. 196-225.
- Easterly, W. and Fischer, S. (2001). "Inflation and the Poor." *Journal of Money, Credit and Banking*. Vol. 33. No. 2, Part 1: Hal. 160-178.
- Gallup, J. L., Radelet, S. and Warner, A. (1998). "Economic Growth and the Income of the Poor." Manuscript. Harvard Institute for International Development.
- Gundlach, E., Pablo, J. N. D. and Weisert, N. (2004). Education is good for the poor: a note on Dollar and Kraay. In. *Growth, inequality, and poverty*. Anthony F. Hoeven Shorrocks and Rolph Van Der. Oxford, Oxford Univ. Press.
- Hanmer, L. and Naschold, F. (2000). "Attaining the International Development Targets: Will Growth Be Enough?" *Development Policy Review*. Vol. 18. Hal. 11-36.
- Hughes, B. B. and Irfan, M. T. (2007). "Assessing Strategies for Reducing Poverty." *International Studies Review*. Vol. 9. No. 4: Hal. 690-710.
- Inder, B. (2004). "Economic growth and contraction and their impact on the poor." Working Paper. No. 03. Monash University.
- Janvry, A. D. and Sadoulet, E. (2000). "Growth, Poverty, and Inequality in Latin America: A Causal Analysis, 1970-94." *Review of Income and Wealth*. Vol. 46. No. 3.
- Kanbur, R. (2004). "Growth, Inequality and Poverty: Some Hard Questions." Working Paper. No. 02. New York. Cornell University.
- Kraay, A. (2006). "When is growth pro-poor? Evidence from a panel of countries." *Journal of Development Economics*. Vol. 80. Hal. 198– 227.
- Kuznets, S. (1955). "Economic growth and income inequality." *American Economic Review*. Vol. 45. Hal. 1-28.
- Lopez, J. H. (2004). "Pro-growth, pro-poor: Is there a tradeoff? ." World Bank Policy Research Working Paper. No. 3378. The World Bank.

- Lustig, N. (2000). "Crises and the Poor: Socially Responsible Macroeconomics." Sustainable Development Department Technical Papers Series. Inter-American Development Bank Washington, D. C.
- Mosley, P., Hudson, J. and Verschoor, A. (2004). "Aid, Poverty Reduction and The New Conditionality." *The Economic Journal*. Vol. 114. Hal. F217-F243.
- Powers, E. T. (1995). "Inflation, Unemployment, and Poverty Revisited." *Economic Review*, Federal Reserve Bank of Cleveland. Vol. 3. Hal. 2-13.
- Ravallion, M. (1997). "Can high-inequality developing countries escape absolute poverty?" *Economics Letters*. Vol. 56. No. 1: Hal. 51-57.
- Ravallion, M. (2001). "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages." *World Development*. Vol. 29. No. 11: Hal. 1803-1815.
- Ravallion, M. (2005). "Inequality is Bad for the Poor." Working Paper. No. 3677: World Bank Policy Research
- Ravallion, M. (2005). "A poverty-inequality trade off?" *Journal of Economic Inequality*. Vol. 3. Hal. 169-181.
- Ravallion, M. and Chen, S. (1997). "What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?" *The World Bank Economic Review*. Vol. 11. No. 2: Hal. 357-382.
- Rodrik, D. (2006). "Understanding South Africa's Economic Puzzles." NBER Working Paper. No. 12565.
- Roemer, M. and Gugerty, M. K. (1997). "Does Economic Growth Reduce Poverty?" CAER Discussion Paper No. 4: Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Romer, C. and Romer, D. (1998). "Monetary Policy and the Well-Being of the Poor." Working Paper. No. 6793: National Bureau of Economic Research.
- Sabir, H. M. and Tahir, S. H. (2012). "The Impact of Different Macroeconomic Variables on Poverty in Pakistan." *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol. 3. No. 10: Hal. 788-799.
- Said, A. and Widyanti, W. D. (2002). *The Impact of Economic Crisis on Poverty and Inequality in Indonesia* Washington, D.C, The World Bank.
- Smeru (2005). "Inequality: An Old Issue of New Relevance." *The SMERU Research Institute*. No. 16.
- Warr, P. G. (2000). "Is growth good for the poor? Thailand's boom and bust." *International Journal of Social Economics*. Vol. 27. No. 7/8/9/10: Hal. 862-877.